



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

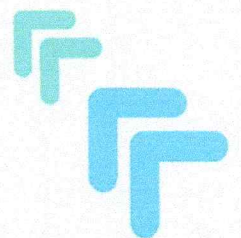


RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2024



JL. ANTARA, SENGGORO, KEC. BENGKALIS, KAB. BENGKALIS-RIAU

KATA PENGANTAR

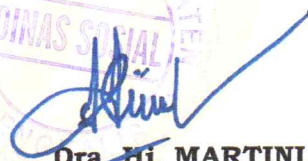
Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat terwujud. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2024.

Rancangan Awal Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Sosial dan menjadi pedoman bagi Dinas Sosial untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024.

Bengkalis, Januari 2023
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



Dra. Hj. MARTINI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630306 199403 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	15
2.4. Review terhadap Ranwal RKPD 2023.....	15
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
BAB V PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkulu. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkulu, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Bengkulu dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rancangan awal Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1). Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2). Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026;
- 7). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalsi Tahun 2021 – 2026;
- 8). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan Renja

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Sosial sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan awal Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkalis, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

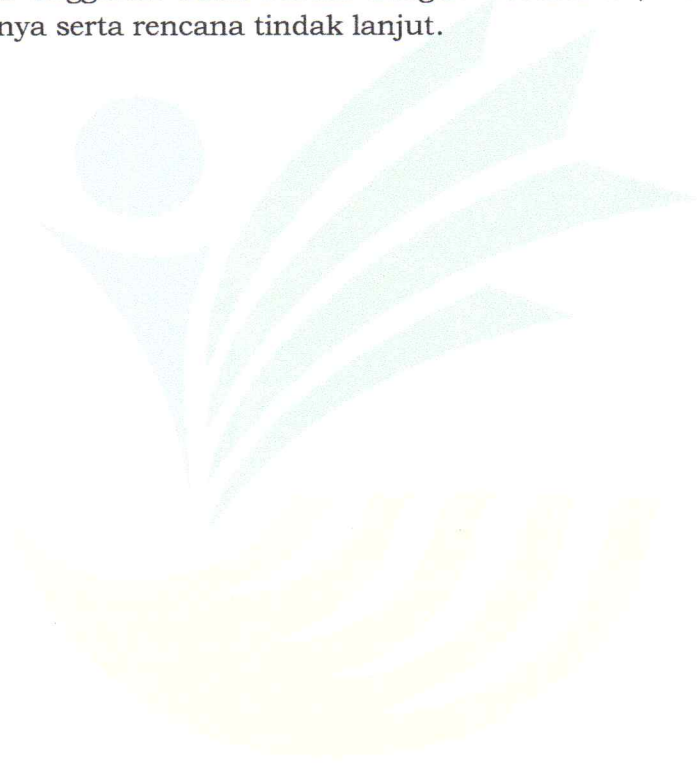
Sosial Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 60.678.859.812,-** yang digunakan untuk membiayai 8 (Delapan) Program 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Sub Kegiatan yang terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

II. Program Pemberdayaan Sosial

- 1. Pemberdayaan Sosial Kominutas Adat Terpencil
 - a. Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
- 2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota
 - c. Peningkatan Kemampuan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota
 - d. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

III. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- 1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - a. Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah

Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

IV. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial
 - f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - j. Pemberian Layanan Kedaruratan
 - k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l. Pemberian Layanan Rujukan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - e. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - f. Pemberian Layanan Rujukan

V. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - a. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

VI. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Makanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi, Sosialiasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana.

VII. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - a. Rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten atau kota
 - b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

VIII. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

II. Program Pemberdayaan Sosial

1. Pemberdayaan Sosial Kominutas Adat Terpencil
2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota

III. Program Rehabilitasi Sosial

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial

IV. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

V. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

VI. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

I. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

II. Program Penanganan Bencana

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan

Program yang tidak mencapai target kinerja :

1. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, dari target yang ditetapkan sebanyak 25 orang terealisasi sebanyak 11 Orang. Rendahnya capaian kinerja tersebut (44%) dikarenakan kasus kekerasan warga migran merupakan kasus yang bersifat insidental, selain itu telah ada kerja sama antara Kepolisian Resor Bengkalis dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam penanganan kasus yang melibatkan warga migran.
2. Program Penanganan Bencana, Capaian Kinerja terhadap RKPd adalah 46% dan Anggaran 62,11 %. Rendahnya Capaian Kinerja tersebut dikarenakan kejadian bencana merupakan kejadian yang bersifat insidental.

- Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

Terhadap Program yang tidak mencapai target terdapat sisi anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk mencapai target

program lainnya.

- **Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut**

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah melakukan perhitungan yang lebih cermat dalam penyusunan kebutuhan anggaran serta monitoring dan evaluasi program secara berkala.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun 2023 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan. Dari 8 (Delapan) Program 19 (Sembilan Belas) Kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik mencapai 100%.

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai sebesar **Rp. 57.280.409.729,- atau 94,40%** dan merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Hal 1 dari 11

No.	Sasaran RKPD	KODE	Unitas/Bidang/Unitas Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target Kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Perangkat Daerah Penanggung				
								I		II		III		IV						13 = 8+10+12+10	14 = 7+13	15 = 14/8 x 100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		60.422.029.520,00	-	16.169.136.712,00	1.134.044.345,00	3.097.318,45	8.190.321,83	8.326.076,20	-	14.751.764.935,00	-	14.751.764.935,00	24,41	Dinas Sosial						
		01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	0	34.124.234,00	0	22.492.400,00	0	82.437.389,00	0	142.749.148,00	-	261.807.179,00	-	-				
		01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dalam satu tahun	14	443.288.600,00	-	3	196.707.000,00	1	34.124.234,00	0	14.012.400,00	2	82.787.389,00	0	84.802.410,00	3,00	159.440.443,00	3,00	159.440.443,00	21,43	35,97
		01.2.01.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dalam satu tahun	29	198.190.000,00	-	4	108.938.000,00	0	0,00	0	4.440.000,00	2	8.640.000,00	0	44.248.738,00	8,00	102.366.736,00	8,00	102.366.736,00	27,59	51,65
		01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	0	781.078.444,00	0	1.632.931,57	0	3.483.723,24	0	2.072.582,80	-	7.891.323.913,00	-	7.891.323.913,00	-	-	-	-
		01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	3880	45.417.514.920,00	-	880	8.789.735.032,00	189	781.078.444,00	185	1.633.931,57	185	3.483.723,24	185	2.072.682,80	560,00	7.891.323.913,00	560,00	7.891.323.913,00	16,67	17,38
		01.2.03	Administrasi Barang		-	-	-	0	41.800.000,00	0	82.400.000,00	0	82.400.000,00	0	144.402.000,00	-	350.802.000,00	-	350.802.000,00	-	-	-	-
		01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor yang diberikan gaji dalam satu tahun	94	1.574.400.000,00	-	158	386.766.000,00	38	41.800.000,00	38	82.400.000,00	38	82.400.000,00	38	144.402.000,00	156,00	350.802.000,00	156,00	350.802.000,00	15,85	22,28

Prepared by: eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Cabang RHPD	NOPE	Misi/ Bidang	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target RENCANA Perangkat Daerah (Tahun 2023)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA Perangkat Daerah (Tahun 2023)		Tingkat Pencapaian Kinerja (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RHPD Tahun 2022)	Tingkat Pencapaian Kinerja (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENCANA s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RHPD Tahun 2022)	Tingkat Pencapaian Kinerja (Rp)
						K	Rp					
01.2.05	Administrasi		Administrasi									
01.2.05.11	Struktur Organisasi											
01.2.06	Administrasi Umum											
01.2.06.01	Administrasi Umum											
01.2.06.02	Kelembagaan											
01.2.06.03	Kelembagaan											
01.2.06.04	Kelembagaan											
01.2.06.05	Kelembagaan											
01.2.06.06	Kelembagaan											
01.2.06.07	Kelembagaan											
01.2.06.08	Kelembagaan											
01.2.06.09	Kelembagaan											
01.2.06.10	Kelembagaan											
01.2.06.11	Kelembagaan											
01.2.07	Kelembagaan											

FILE BY: SAC/DIRY - KABUPATEN BENGKALIS

No	Sasaran RIFPO	KODE	Uraian/Detail dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Subsumber) Kegiatan (Output)	TARIF RENJIRA Perangkit Daerah Tahun 2025 (ekstir periode RENJIRA)	Realisasi Laporan Kinerja RENJIRA 2024 (Tahun 1-2)	Target Kinerja dan Anggaran RIFPO Tahun Belanja (Tahun 1-3) yang dihabiskan	Realisasi Kinerja PPK (Triwulan)						Realisasi Kinerja dan Anggaran RENJIRA s.d Tahun Akhir Tahun Perencanaan RIFPO (Tahun 1-3)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJIRA s.d Akhir Tahun 2022	Perkiraan Dampak UPE
								I	II	III	IV	V	VI			
01.2.02.02	Perbaikan keadaan Desa Operasional dan Subdit	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00
01.2.02.05	Pengaturan lahan	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00
01.2.02.10	Pengaturan dan pemeliharaan lingkungan hidup	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00
01.2.02.10	Pengaturan dan pemeliharaan lingkungan hidup	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00
01.2.02.02	Perbaikan keadaan Desa Operasional dan Subdit	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00
01.2.02.05	Pengaturan lahan	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00
01.2.02.10	Pengaturan dan pemeliharaan lingkungan hidup	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00
01.2.02.10	Pengaturan dan pemeliharaan lingkungan hidup	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00	0.000.000.000.00

No.	Subsaran RUPD	NODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Register (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2020 (tahun periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENCANA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d tahun 2022	Peringkat 1 Daerah Peringkat						
								I		II		III		IV						K	RQ	K	RQ	K	RQ
								K	RQ	K	RQ	K	RQ	K	RQ										
Total Realisasi Capaian Kinerja per Program (%)								6,03	6,83	37,37	21,50	53,76	23,44	100,00	41,18	200,00	90,31			24,84	41,32				
Prebidai Kinerja Program								Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk				
02			PROGRAM PEMBUDAYAAN SOSIAL		5.950.132.249,00	-	2.190.302.500,00	88.400.000,00	82.449.200,00	1.821.139,94	0,00	2.327.803,84	0,00	5.441.726.152,00	-	5.441.726.152,00	-	96,57	Dirang						
02.1.01			Pembudayaan sosial komunitas Adat Terpencil (KAT)					0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.421,11	0,00	1.400.307.200,00		1.400.307.200,00									
02.1.01.01			Pembudayaan Sosial KAT	Jumlah Masyarakat KAT yang mendapatkan bantuan sosial dalam satu tahun	1079 Orang	1.032.917.000,00		200 Orang	0,00	0 Orang	0,00	1.000.000,00	0,00	1.007.100.000,00	200,00	1.007.100.000,00	200,00	80,17							
02.1.01.02			Peningkatan kapasitas dan pendampingan KAT	Jumlah keluarga KAT yang diberikan peningkatan kapasitas dan pendampingan dalam satu tahun	200 keluarga	38.600.000,00		40 keluarga	0,00	0 keluarga	0,00	27.251.000,00	0,00	20.400.000,00	40,00	28.177.000,00	40,00	16,87							
02.1.02			Dangembangun Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Koba					0,00	28.400.000,00	0,00	1.184.260,64	0,00	2.088.443,73		4.056.419.472,00		4.056.419.472,00								
02.1.02.02			Peningkatan Kemampuan Potensi Masyarakat Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Koba	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diberikan peningkatan kemampuan potensi dalam satu tahun	844 Orang	1.010.916.819,00		111 Orang	26.400.000,00	0 Orang	26.400.000,00	0 Orang	87.182.000,00	111 Orang	83.800.000,00	11,00	183.942.000,00	11,00	13,42						
02.1.02.03			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten Koba	Jumlah Pendamping PKM yang diberikan peningkatan kemampuan potensi dalam satu tahun	4840 Orang	992.720.000,00		76 Orang	4.400.000,00	0 Orang	418.441,900,00	0 Orang	466.103,000,00	76 Orang	1.500.367.660,00	76,00	1.500.367.660,00	76,00	100,00						
02.1.02.04			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten Koba	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diberikan bantuan sarana prasarana	40 Lembaga	1.029.837.434,00		0 Lembaga	14.000.000,00	0 Lembaga	81.038.800,00	0 Lembaga	1.117.440,300,00	0 Lembaga	1.868.194.000,00	4,00	1.868.194.000,00	4,00	20,32	100,00					

No.	Cobakan RHPD	KODE	Instansi/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Regulasi	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA Sempai dengan RENCANA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RHPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RHPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RHPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d tahun 2022	Peningkatan Daerah Persempitan							
								I				II				III								13	14		15			
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					13	14	15	16	17		
		02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Pemuda Lembaga Kultural Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah kelas yang ditayangkan LK3 dalam satu tahun. Jumlah SDM LK3 yang diberikan peningkatan kemampuan potensi dalam satu tahun	1.000 1.140 1.140	913.706.000,00	-	100,00 100,00 100,00	197.518.000,00	100,00	9.800.000,00	0,00	18.980.000,00	30,00	190.000.000,00	30,00	1.111.609.147,00	100,00	913.774.649,00	100,00	913.774.649,00	80,16	86,53							
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Predikat Kinerja Program								Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk		
		03.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		630.299.274,00	-	-	20.622.000,00				0,00	2.430.000,00		0,00	0,00	0,00	-	2.830.000,00	-	2.830.000,00	-	0,45		Dinas Sosial					
		03.2.01.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	2.830.000,00	-	2.830.000,00	-	0,45							
		03.2.01.02	Penyediaan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi penulangannya ke desa/kelurahan asal dalam satu tahun	0,00 0,00	630.299.274,00	-	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-	2.830.000,00	-	2.830.000,00	-	0,45							
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Predikat Kinerja Program								Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk
		04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		5.292.297.640,00	-	-	2.340.221.000,00				0,00	214.210.000,00		24.322.000,00	0,00	20.957.000,00	-	1.779.146.500,00	-	1.779.146.500,00	-	33,34		Dinas Sosial					
		04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Fisik dan Anak Lanjutan Lanjut Usia Tertinggal serta Penderita Penyakit di Luar Penyakit Sosial								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1.387.096.800,00	-	1.387.096.800,00	-	33,34							

No. Substansi RHPD	KODE	Unit/Divisi/Instansi Pemeliharaan/Detail dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target MBO/Target Kinerja/Target (Aksi/Perilaku/Target) (Unit/Target/Target)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA 2022 (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RHPD (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RHPD (Rp)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RHPD (Rp)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RHPD Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RHPD (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RHPD (Rp)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RHPD (Rp)
					1	2	3	4	5	6	7	8				
04.2.01.01	Pelayanan	Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah PMS yang terdapat dalam satu tahun	375 orang	110.000.000,00	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2.01.02	Pelayanan	Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah PMS yang terdapat dalam satu tahun	375 orang	110.000.000,00	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2.01.03	Pelayanan	Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah PMS yang terdapat dalam satu tahun	375 orang	110.000.000,00	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2.01.04	Pelayanan	Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah PMS yang terdapat dalam satu tahun	375 orang	110.000.000,00	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2.01.05	Pelayanan	Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah PMS yang terdapat dalam satu tahun	375 orang	110.000.000,00	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2.01.06	Pelayanan	Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah PMS yang terdapat dalam satu tahun	375 orang	110.000.000,00	Rp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Subseder RAKPD	KODE	Uraian/ Bidang (Inden)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RENASTRA		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang dialokasikan		Realisasi Kinerja dan Anggaran RAKPD Tahun 2022		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022		Peringkat Desentralisasi	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
4		04.2.01.11	Pembinaan Pechitaan Pesisir Kelapa	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	300	137.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	24.290.000,00	24,00	24.290.000,00	5,00	6,00
		04.2.01.12	Pembinaan Lapangan	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	160	248.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	37.910.000,00	23,00	37.910.000,00	10,10	10,20
		04.2.02	Pembinaan Sosial	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	200	124.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.751.000,00	0,00	47.751.000,00	0,00	4,00
		04.2.02.05	Pembinaan Pemukiman	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	200	124.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	47.751.000,00	0,00	47.751.000,00	0,00	4,00
		04.2.02.04	Pembinaan Stambul	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	200	141.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.2.02.05	Pembinaan Nelayan	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	200	124.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.2.02.07	Pembinaan Pengolahan Ikan	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	200	124.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.2.02.10	Pembinaan ASB K4	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	240	251.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.2.02.12	Pembinaan Layanan Perikanan Kelapa	Jumlah PMS yang mendapatkan bimbingan teknis	220	163.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Subsah RUPD	KODE	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Output)	Tingkat RENSTRA Peringkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sesuai dengan RENAS Peringkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Kinerja dan Anggaran RUPD Tahun Berakhir (Tahun n-1 yang direvisi)		Realisasi Kinerja Pada Triliun												Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2022 (Materi Tahun Pelaksanaan RUPD Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s.d Tahun 2022	Peringkat Daerah Peringkat								
							A	B	I			II			III			IV													
									S	T	U	S	T	U	S	T	U	S	T	U				S	T	U					
TOTAL BINA-RASA CAHAYA KEMASIA PER PROGRAM (Rp)																															
																			33.850.374.100,00												
05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMERTAHAN WILAYAH, PERSEKUTUAN, PERTAHANAN, KEAMANAN, KEMAMPUAN PERTAHANAN, KEKAWALAN PERTAHANAN, KEMAMPUAN PERTAHANAN, KEKAWALAN PERTAHANAN, KEMAMPUAN PERTAHANAN, KEKAWALAN PERTAHANAN	05.01	Pemerintah Provinsi	Jumlah PAKS, SAKS, BAKS, KAKS, SAKS, BAKS, KAKS, SAKS, BAKS, KAKS	180.837.119,00	-	-	0,00	0,00	17,88	14,10	38,88	22,58	89,47	38,81	82,78	75,48	37.833.777.438,00	22,12	21,88											
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL BINA-RASA CAHAYA KEMASIA PER PROGRAM (Rp)																							
																											1.795.545.899,00				
06	PROGRAM PENANGKALAN BENCANA	06.01	Peringatan Sosial	Jumlah Bantuan Sosial Bencana Alam dan Sosial	18.918.827.889,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.968.300,00	-	13,79	0,00	0,00									

No.	Sesahan RKPD	KODE	Unitas/Bidang/Instansi/ Pemerintah/ Daerah/ dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah/ Pulu Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENCANA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Peringkat Daerah Penanggung		
					6		7			8		9		10		11		12		13		14				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan paket bahan makanan dalam satu tahun	9500	5.313.294.682,00	-	-	0000	983.181.700,00	0 Orang	0,00	0000	392.818.700,00	667	31.720.000,00	1360	610.678.000,00	2.790,00	936.214.700,00	2.790,00	936.214.700,00	29,37	17,62		
		06.2.01.02.	Penyediaan Banteng	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan paket sandang dalam satu tahun	3000	2.662.860.208,00	-	-	500	428.408.000,00	44	33.000.000,00	70	1.170.000,00	0 Orang	0,00	307	210.050.000,00	429,00	252.868.200,00	429,00	252.868.200,00	14,30	8,74		
		06.2.01.04.	Pengangan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah paket pemakanan untuk korban bencana alam dan sosial bagi kelompok rentan yang disediakan dalam satu tahun	1000	930.000.000,00	-	-	00	106.455.000,00	0 Paket	0,00	00	3.898.000,00	0 Paket	0,00	3 Paket	1.770.000,00	3,00	12.668.000,00	3,00	12.668.000,00	0,30	1,56		
		06.2.01.05.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan dukungan psikososial dalam satu tahun	1000	128.000.000,00	-	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
		06.2.02.	Penyelenggaraan Pembudayaan Masyarakat terhadap Kesupekaan Bencana																							
		06.2.02.01.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tanun Siaga Bencana	Jumlah Tanun Siaga Bencana yang terlibat dalam koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dalam satu tahun	1420	1.286.590.000,00	-	-	27	237.450.000,00	0 Orang	3.200.000,00	0 Orang	87.948.000,00	0	10.440.000,00	27	258.172.300,00	27,00	241.237.300,00	27,00	241.237.300,00	1,67	18,73		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										1,00	0,02	01,40	01,40	0,20	1,81	40,00	36,27	48,00	62,11			24,72	9,29			
Predikat Kinerja Program										Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk		
	IV	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			2.911.997.326,00				625.871.800,00		41.800.000,00		41.800.000,00		152.114.280,00		380.118.835,00		597.890.795,00		597.890.795,00		25,87	0,84	Buruk	

No.	Sasaran RPKD	KODE	Unsur, Bidang, Urusan, Pemerintahan Daerah, Urusan Program, Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Kinerja RENSTRA sesuai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (t-2)	Target Kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun t-1) yang direvisi/ direalisasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD yang direvisi/ direalisasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2022)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022	Perangkat Daerah yang
								I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD berikutnya ¹⁾ :																			

1) Disiapkan Kepala Bappeda


 Disusun,
 Bengkulu, - Januari - 2023
 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu

Dra. H. MARTINI, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196303061994002002

Direvisi,
 Bengkulu, - Januari - 2023
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

RINTO, SE, M.Si
 Pembina
 NIP. 196106012006031002

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sampai akhir Desember 2022, semua program/kegiatan yang dilaksanakan hampir semuanya memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana walaupun terdapat beberapa program/kegiatan yang belum memenuhi target secara maksimal.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem E - Monev dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah seperti yang terlihat pada Tabel Berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Cakupan Jaminan Sosial bagi PPKS

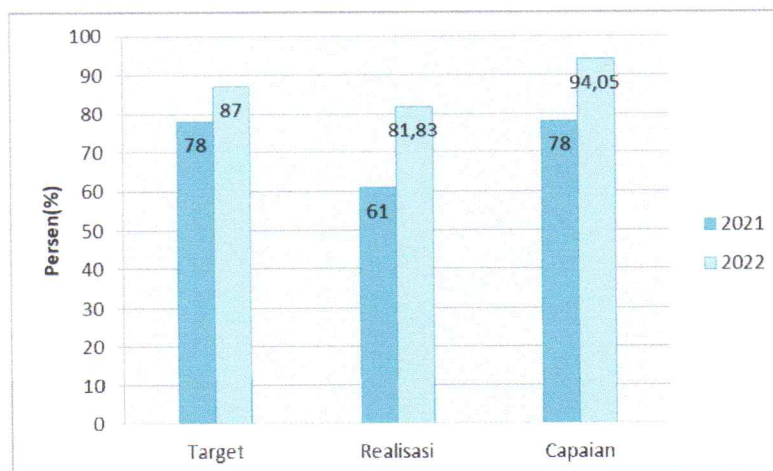
Tabel Capaian 2021 terhadap 2022 pada Sasaran 1

Indikator	2021	2022			Capaian 2021 Terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	78%	87%	81,83%	94,05%	120%

Penjelasan Tabel Capaian

Tabel Perhitungan Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator	Formula	2021		2022		2021		2022	
		Target (KK)	Capaian (KK)	Target (KK)	Capaian (KK)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Memperoleh pemenuhan Kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah PPKS Seluruhnya}} \times 100\%$	39.397	33.285	59.747	56.197	78	61	87	81,83
		50.509	50.509	68.675	68.675				



Gambar 3. 1 Grafik Perbandingan Capaian sasaran 1 tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan tabel 3.2 dan gambar 3.1 pada tahun 2022 dari target kinerja sasaran 1 sebesar 87% terealisasi 81,83% dengan Capaian Kinerja 94,05%. Perhitungan lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.3, dari jumlah seluruh PPKS 68.675 KK yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 56.197 KK (Tabel 3.4). Tidak tercapainya target ini dikarenakan meningkatnya jumlah PPKS jika dibandingkan pada tahun 2021, yaitu dari 50.509 KK menjadi 69.675 KK. hal ini dikarenakan meningkatnya usulan masyarakat Desa dan Kelurahan yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3. 1 Jumlah Usulan DTKS Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH USULAN DTKS (KK)	
		2021	2022
1	BENGKALIS	1,596	5,077
2	BANTAN	1,068	2,036
3	BUKIT BATU	228	603
4	SIK KECIL	289	308
5	BANDAR LAKSAMANA	27	262
6	MANDAU	474	1,721
7	PINGGIR	244	577
8	BATHIN SOLAPAN	1,096	3,480
9	TALANG MUANDAU	6	228
10	RUPAT	1,171	1,402
11	RUPAT UTARA	212	204
JUMLAH		6411	15898

Namun demikian, jika dilihat dari jumlah penerima bantuan, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan dari 33.285 KK menjadi 56.197 KK. Hal ini dikarenakan :

1. Dinas Sosial sudah memiliki aplikasi berbasis web, Sistem Informasi bantuan sosial (Si Bos) yang mengintegrasikan data penerima bantuan Sosial dari seluruh APBD maupun APBN di Kabupaten Bengkalis
2. Adanya Verifikasi dan Validasi secara berkala terhadap Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga data yang telah terverifikasi dapat diusulkan sebagai penerima bantuan pusat.
3. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) otonom telah menggunakan Aplikasi Sistem Aplikasi Layanan Bermartawah, maju dan sejahtera (SIYAP BERMASA). Dengan aplikasi ini data penyaluran bersifat *real time* sehingga permasalahan kegagalan penyaluran dengan cepat dapat diselesaikan. Hal ini dibuktikan dengan persentase bantuan yang tersalurkan sebesar 99,98 % dimana dari total penerima 15.559 KPM tersalurkan 15.556 KPM.

Tabel 3. 2 Jumlah Penerima Bantuan sosial Berdasarkan Jenis Bantuan

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima
1	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom	24.280 KPM
2	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pusat	15.556 KPM
3	Bantuan Sembako Anak Tidak Mampu	946 Anak
4	Bantuan Sembako Lansia	1196 Orang
5	Bantuan sembako Disabilitas	67 Orang
6.	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	13.518 KK
7.	Bantuan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	634 KK

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Pemberi Layanan Kesejahteraan Sosial

Tabel 3. 3 Capaian 2021 terhadap 2022 pada Sasaran 2

Indikator	2021	2022			Capaian 2021 terhadap 2022
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PSKS yang tersertifikasi dan akreditasi	100%	56%	57%	101,79%	101,79%

Tabel 3. 4 Perhitungan Capaian Kinerja sasaran 2

Indikator	Formula	2021		2022		2021		2022	
		Target (jiwa)	Capaian (jiwa)	Target (jiwa)	Capaian (jiwa)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase PSKS yang tersertifikasi dan akreditasi	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang tersertifikasi / akreditasi}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$	89	89	93	94	54%	54%	56%	57%
		166	166	166	166				

Berdasarkan tabel 3.5 dan 3.6 pada tahun 2022 PSKS yang sudah tersertifikasi/terakreditasi sejumlah 89 orang/lembaga dari 166 orang/lembaga. Dengan begitu dari target 56% yang ditetapkan telah tercapai sebesar 57%. Dari data pada tabel 3.7, tercapainya target tersebut dikarenakan meningkatnya lembaga yang terakreditasi pada tahun 2022. Dari total 13 lembaga telah terakreditasi sebanyak 4 lembaga pada tahun 2021 dan 9 lembaga pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya bentuk Pembinaan Dinas Sosial terhadap pemenuhan administrasi kelembagaan serta kelayakan sarana dan prasarana lembaga untuk dapat terakreditasi.

Tabel 3. 5 PSKS Tersertifikasi/Akreditasi Tahun 2021 dan 2022

Jenis PSKS	Jumlah PSKS	PSKS yang sudah tersertifikasi/akreditasi	
		2021	2022
Pendamping PKH	74 Orang	64 Orang	64 Orang
Pendamping KUBE	40 Orang	0	0
Lembaga Kesejahteraan social	13 Lembaga	4 Lembaga	9 Lembaga
TKSK	11 Orang	7 Orang	7 Orang
Tagana	27 Orang	13 Orang	13 Orang
Peksos	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Total	166	89	94

Sasaran 3 : Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS

Tabel 3. 6 Capaian 2021 Terhadap 2022 Pada Sasaran 3

Indikator	2021	2022		Capaian 2021 terhadap 2022	
	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
Persentase PPKS terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	100%	94%	93,3%	99,25%	99,25%

Tabel 3. 7 Perhitungan Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator	Formula	2022		2022	
		Target (jiwa)	Realisasi (jiwa)	Target (%)	Realisasi (%)
Persentase PPKS terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	$\frac{\text{Jumlah PSKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial}}{\text{Jumlah PSKS Terlantar}} \times 100\%$	2337	2321	94%	93,3%
		2486	2486		

Berdasarkan Tabel 3.9 dan 3.10 dapat dilihat bahwa persentase PPKS terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti adalah sebesar 93,3% pada tahun 2022. Dimana dari total 2486 PPKS terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial sebanyak 2321 Jiwa. Tidak tercapainya target ini dikarenakan :

1. Kasus PPKS terlantar merupakan kasus yang bersifat Insidental yang kasusnya berbeda setiap tahunnya, sehingga terdapat *gap* antara target dan kasus yang terjadi.
2. Masih adanya penolakan dari keluarga PPKS terkait intervensi yang dilakukan Dinas Sosial untuk pemulihan fungsi sosial PPKS terutama dalam pelayanan rujukan ke panti sosial dan akses pelatihan ke balai atau lembaga pelatihan.

3. Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas sosial Kabupaten Bengkalis Nomor : 700/ITDA/LHR/VII/2022/720, Dinas Sosial mendapatkan Predikat B. Terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki baik Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan evaluasi Kinerja.

Pada tahun 2022, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau terdapat 2 temuan yang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial.

Tabel 3. 8 Capaian 2021 Terhadap 2022 pada Sasaran 4

Indikator	2021	2022		Capaian 2021 terhadap 2022	
	Capaian	Target	Realisasi		Capaian
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB
Persentase hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan, tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, berbagai permasalahan pembangunan bidang sosial yang dihadapi tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang sosial. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis ditinjau dari gambaran pelayanan, visi dan misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah dari Renstra Kementerian Sosial, sasaran jangka menengah dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau bagi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas sosial adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin dan rentan yang tepat sasaran
2. Data Kemiskinan Ekstrim
3. Keberfungsian sosial masyarakat rentan (disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta gelandangan pengemis)
4. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
5. Kualitas SDM penyelenggara kesejahteraan sosial dalam penangan permasalahan sosial

Berdasarkan uraian beberapa masalah strategis di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua permasalahan tersebut bermuara kepada kualitas kinerja layanan sosial secara menyeluruh baik itu Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial maupun rehabilitasi sosial sehingga dapat dirumuskan bahwa isu strategis yang akan diangkat oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah rendahnya kesejahteraan sosial PPKS.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :



Tabel T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kabupaten Bengkulu

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				Rp 54.434.200.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN					
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				Rp 54.434.200.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial		100%	Rp 12.834.400.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun dalam satu tahun		7 Dokumen	Rp 400.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun dalam satu tahun				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	2 Dokumen	Rp 250.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu			
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	5 Laporan	Rp 150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu			
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun		672 Orang/Bulan	Rp 8.250.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkulu	672 Orang/Bulan	Rp 8.250.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkulu			
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah dalam satu tahun		12 Bulan	Rp 249.600.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah dalam satu tahun				
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkulu	12 Dokumen	Rp 249.600.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkulu			
IV	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dalam satu tahun		25 Orang	Rp 195.000.000	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dalam satu tahun				
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bengkulu	25 Orang	Rp 195.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bengkulu			
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun		12 Bulan	Rp 1.205.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Paket	Rp 30.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Paket	Rp 210.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu			
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Paket	Rp 120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu			
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Paket	Rp 110.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bengkulu			
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bengkulu	60 Dokumen	Rp 65.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bengkulu			
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkulu	150 Laporan	Rp 550.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkulu			
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Kab. Bengkulu	12 Dokumen	Rp 120.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Kab. Bengkulu			
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dalam satu tahun		19 Unit	Rp 430.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dalam satu tahun				
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bengkulu	17 Unit	Rp 230.000.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bengkulu			
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bengkulu	15 Unit	Rp 200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bengkulu			
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Sosial		12 Bulan	Rp 690.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Sosial				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkulu	12 Laporan	Rp 210.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkulu			
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Laporan	Rp 285.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkulu			
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Laporan	Rp 195.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu			
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Sosial		12 Bulan	Rp 1.414.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Sosial				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkulu	60 Unit	Rp 450.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkulu			

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	8 Unit	Rp	364.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis			
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	120 Unit	Rp	600.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis			
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial		100%	Rp	3.551.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial				
1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah masyarakat KAT yang diberikan pemberdayaan sosial dalam satu tahun		100 Keluarga	Rp	330.000.000	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah masyarakat KAT yang diberikan pemberdayaan sosial dalam satu tahun				
1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan	Kab. Bengkalis	50 Keluarga	Rp	250.000.000	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan	Kab. Bengkalis			
2	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	50 Keluarga	Rp	80.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
II	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial		100%	Rp	3.221.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial				
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	Kab. Bengkalis	11 Orang	Rp	250.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	Kab. Bengkalis			
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	200 Keluarga	Rp	1.450.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	5 Lembaga	Rp	1.176.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bengkalis	10 Sertifikat	Rp	345.000.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bengkalis			
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGRARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun		100%	Rp	20.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGRARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun				
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya kedesa/kelurahan asal dalam satu tahun		50 Orang	Rp	20.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya kedesa/kelurahan asal dalam satu tahun				
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya ke desa / kelurahan asal dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	15 Orang	Rp	20.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya ke desa / kelurahan asal dalam satu tahun	Kab. Bengkalis			
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		100%	Rp	3.394.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial				
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang mendapat Pelayanan		100%	Rp	2.009.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang mendapat Pelayanan				
1	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai idengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Kab. Bengkalis	230 Orang	Rp	60.000.000	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai idengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Kab. Bengkalis			
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	100 Orang	Rp	90.000.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	90 Orang	Rp	320.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	15 Orang	Rp	135.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	Kab. Bengkalis	92 Orang	Rp	400.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	Kab. Bengkalis			
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	65 Orang	Rp	65.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			

7	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	100 Orang	Rp	18.000.000	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	1 Orang	Rp	200.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Kab. Bengkalis	500 orang	Rp	30.000.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	Kab. Bengkalis			
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	30 Orang	Rp	591.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	10 Orang	Rp	45.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	30 Orang	Rp	55.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
II	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial		100%	Rp	1.385.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial				
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Kab. Bengkalis	250 Orang	Rp	150.000.000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	Kab. Bengkalis			
2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	60 Orang	Rp	80.000.000	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	130 Orang	Rp	285.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan	Kab. Bengkalis	300 Orang	Rp	350.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan	Kab. Bengkalis			
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	30 Orang	Rp	50.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
6	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan	Kab. Bengkalis	50 Orang	Rp	15.000.000	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan	Kab. Bengkalis			
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	50 Orang	Rp	50.000.000	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	35 Orang	Rp	55.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
9	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	50 Orang	Rp	350.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial		95%	Rp	32.733.800.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial				
I	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar		220 Anak	Rp	580.000.000	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar				
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	220 Anak	Rp	580.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
II	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp	32.153.800.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Bengkalis	66.500 Orang	Rp	375.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Bengkalis			
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	56.197 Keluarga	Rp	190.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis			
3	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Kab. Bengkalis	15.633 Keluarga	Rp	30.120.000.000	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan	Kab. Bengkalis			

4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	100 Orang	Rp	1.468.800.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis				
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial		100%	Rp	1.445.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial					
I	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	Rp	1.295.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya					
1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	Kab. Bengkalis	2.000 Orang	Rp	950.000.000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan	Kab. Bengkalis				
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	300 Orang	Rp	250.000.000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis				
3	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	15 Orang	Rp	25.000.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis				
4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	35 Orang	Rp	70.000.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis				
II	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100%	Rp	150.000.000	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	29 Orang	Rp	150.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis				
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara dalam setahun		100%	Rp	456.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara dalam setahun					
I	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara Kondisi dan Keadaannya		1 TMP	Rp	456.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara Kondisi dan Keadaannya					
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam	Kab. Bengkalis	52 Makam	Rp	305.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam	Kab. Bengkalis				
2	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	12 Laporan	Rp	151.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis				
TOTAL JUMLAH BELANJA URUSAN						Rp 54.434.200.000						Rp	-

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Forum Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2024. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2024.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Pemerintahan Bidang Sosial ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Dinas Sosial bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis..

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C.32.

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bengkalis**

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	I PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kelurahan Kota Bengkalis	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	
	I PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	I Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kelurahan Kota Bengkalis	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Anak	
	II Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kelurahan Kota Bengkalis	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada dasarnya, tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten / kota untuk 5 (lima) tahun ke depan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuh kembangkan integritas perencanaan yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020-2024 dirumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk menggambarkan terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional. Sasaran strategis Kementerian Sosial tercantum dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 9 Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	41	43	46	49	52
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	1) Indeks Partisipasi Sosial	0.682	0.684	0.686	0.688	0.70
		2) Persentase (%) SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
		3) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi	28%	30%	32%	35%	40%
		4) Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	56%	68%	79%	81%	100%
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	1) Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program pe-nanggulangan kemiskinan	40%	50%	60%	70%	80%

Sumber: Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Target pada sasaran strategis 1 mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua defenisi yaitu rentan miskin dan atau ketidak mampuan seperti PPKS. Fokus peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dalam lima tahun diarahkan pada

pemberian bantuan sosial terintegrasi serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yaitu pemberin bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui bantuan usaha ekonomi produktif. Dalam pelaksanaannya masalah yang dihadapi Dinas Sosial adalah belum terpenuhinya 40% penduduk dengan status sosial ekonomi terendah masuk di dalam DTKS. Dari total 565.569 jiwa penduduk Kabupaten Bengkalis hanya 143.101 jiwa atau 25% yang terdata dalam DTKS. Sehingga masih terdapat sasaran yang belum menerima bantuan dan pemberian bantuan kepada penerima yang layak namun tidak terdata di dalam DTKS.

Pada sasaran strategis 1 capaian keberhasilan diukur melalui indikator strategis indeks kesejahteraan sosial yang merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial setiap Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. Beberapa indikator yang diukur untuk mengetahui indeks kesejahteraan sosial yaitu indeks keberfungsian dan indeks perlindungan sosial. Dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial di kabupaten Bengkalis belum dilakukan Dinas Sosial, hal ini dikarenakan untuk indeks perlindungan dan keberfungsian sosial sangat dibutuhkan tenaga ahli/fungsional pekerja sosial. Saat ini di Dinas sosial hanya terdapat satu orang pekerja sosial yang merupakan pendamping rehabilitasi sosial dari Kementerian Sosial.

Sasaran strategis 2 merupakan sasaran yang berorientasi pada meningkatkan layanan melalui peningkatan pemberi layanan. Sesuai dengan sasaran dinas sosial meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial. Di Kabupaten bengkalis lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) yang telah terakreditasi berjumlah 4 LKS dari 13 LKS yang terdaftar (31%). Untuk tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial dari total 153 orang sudah terakreditasi 85 orang (55%). Meski sudah memenuhi target nasional namun capaian tersebut masih rendah. Hal ini dikarenakan belum optimalnya upaya fasilitasi dari Dinas Sosial dalam proses akreditasi atau sertifikasi.

Sesuai dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagai Intansi yang mendapatkan tugas pembantuan dari Bupati di Bidang Sosial maka Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis lebih banyak berisi program dan Kegiatan yang bersifat Pelayanan sosial melalui jaminan, perlindungan, dan rehabilitasi sosial untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2024 masih sesuai dengan Renstra yakni :

Tabel 3. 10 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran
1	2	3	4
1.	Terwujudnya kesejahteraan sosial PPKS	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
		Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi
		Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
			Persentase hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang sosial;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang sosial dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan di bidang sosial.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 7 program di Dinas Sosial;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 sebanyak 17 kegiatan di Dinas Sosial
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 secara total sebesar **Rp. 54.434.200.000,-** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis. Program dan kegiatan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel Berikut

Tabel T-C.29. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Bidang Penanggung jawab
U	Bid.	U	Prog	Keg			Sub	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						Rp 58.061.400.000		
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						Rp 58.061.400.000		
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan di Dinas Sosial	100%		Rp 12.834.400.000		100%	Rp 12.354.400.000	
1	06	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang di susun dalam satu tahun	7 Dokumen		Rp 400.000.000		7 Dokumen	105.000.000	
1	06	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis 2 Dokumen		Rp 250.000.000	APBD	2 Dokumen	230.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis 5 Laporan		Rp 150.000.000	APBD	5 Laporan	165.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan dalam satu tahun	672 Orang/Bulan		Rp 8.250.000.000		672 Orang/Bulan	8.300.000.000	
1	06	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis 672 Orang/Bulan		Rp 8.250.000.000	APBD	672 Orang/Bulan	8.300.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah dalam satu tahun	12 Bulan		Rp 249.600.000		12 Bulan	249.600.000	
1	06	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkalis 12 Dokumen		Rp 249.600.000	APBD	12 Dokumen	249.600.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dalam satu tahun	25 Orang		Rp 195.000.000		25 Orang	195.000.000	
1	06	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bengkalis 25 Orang		Rp 195.000.000	APBD	25 Orang	Rp 195.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	12 Bulan		Rp 1.205.000.000		12 Bulan	1.300.000.000	
1	06	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis 12 Paket		Rp 30.000.000	APBD	12 Paket	Rp 30.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis 12 Paket		Rp 210.000.000	APBD	12 Paket	Rp 210.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis 12 Paket		Rp 120.000.000	APBD	12 Paket	Rp 125.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bengkalis 12 Paket		Rp 110.000.000	APBD	12 Paket	Rp 130.000.000	Dinas Sosial

1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bengkulu	60 Dokumen	Rp 65.000.000	APBD		60 Dokumen	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkulu	150 Laporan	Rp 550.000.000	APBD		175 Laporan	600.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bengkulu	12 Dokumen	Rp 120.000.000	APBD		12 Dokumen	155.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Dinas Sosial dalam satu tahun		19 Unit	Rp 430.000.000			11 Unit	Rp 185.000.000	
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bengkulu	17 Unit	Rp 230.000.000	APBD		5 Unit	100.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bengkulu	15 Unit	Rp 200.000.000	APBD		5 Unit	Rp 85.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Sosial		12 Bulan	Rp 690.000.000			12 Bulan	Rp 705.000.000	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkulu	12 Laporan	Rp 210.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 210.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Laporan	Rp 285.000.000	APBD		12 Laporan	300.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Laporan	Rp 195.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 195.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Dinas Sosial		12 Bulan	Rp 1.414.800.000			12 Bulan	1.314.800.000	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkulu	60 Unit	Rp 450.000.000	APBD		60 Unit	Rp 450.000.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkulu	8 Unit	Rp 364.800.000	APBD		8 Unit	Rp 364.800.000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkulu	120 Unit	Rp 600.000.000	APBD		125 Unit	Rp 500.000.000	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial		100%	Rp 3.551.000.000			100%	Rp 3.285.000.000	
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah masyarakat KAT yang diberikan pemberdayaan sosial dalam satu tahun		100 Keluarga	Rp 330.000.000			150 Keluarga	Rp 450.000.000	
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	50 Keluarga	Rp 250.000.000	APBD		80 Keluarga	Rp 350.000.000	Dinas Sosial

1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	50 Keluarga	Rp 80.000.000	APBD		70 Keluarga	Rp 100.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial		100%	Rp 3.221.000.000			100%	Rp 2.835.000.000	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	11 Orang	Rp 250.000.000	APBD		11 Orang	Rp 185.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	200 Keluarga	Rp 1.450.000.000	APBD		200 Keluarga	Rp 1.450.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	5 Lembaga	Rp 1.176.000.000	APBD		5 Lembaga	Rp 900.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	10 Sertifikat	Rp 345.000.000	APBD		10 Sertifikat	Rp 300.000.000	Dinas Sosial
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Kasus Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani dalam satu tahun		100%	Rp 20.000.000			100%	Rp 30.000.000	
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangannya kedesa/kelurahan asal dalam satu tahun		50 Orang	Rp 20.000.000			50 Orang	Rp 30.000.000	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di fasilitasi pemulangannya ke desa / kelurahan asal dalam satu tahun	Kab. Bengkalis	15 Orang	Rp 20.000.000	APBD		50 Orang	Rp 30.000.000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		100%	Rp 3.394.000.000			100%	Rp 3.096.000.000	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial		100%	Rp 2.009.000.000			100%	Rp 1.888.000.000	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai idengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	230 Orang	Rp 60.000.000	APBD		400 Orang	Rp 135.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	100 Orang	Rp 90.000.000	APBD		300 Orang	Rp 160.000.000	Dinas Sosial

1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	90 Orang	Rp 320.000.000	APBD		100 Orang	Rp 350.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	15 Orang	Rp 135.000.000	APBD		45 Orang	Rp 125.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	92 Orang	Rp 400.000.000	APBD		50 Orang	Rp 400.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	65 Orang	Rp 65.000.000	APBD		50 Orang	Rp 65.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	100 Orang	Rp 18.000.000	APBD		100 Orang	Rp 18.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	1 Orang	Rp 200.000.000	APBD		30 Orang	Rp 300.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	500 orang	Rp 30.000.000	APBD		500 Orang	Rp 30.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	30 Orang	Rp 591.000.000	APBD		100 Orang	Rp 175.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	10 Orang	Rp 45.000.000	APBD		20 Orang	Rp 75.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	30 Orang	Rp 55.000.000	APBD		30 Orang	Rp 55.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial		100%	Rp 1.385.000.000			100%	Rp 1.208.000.000	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	250 Orang	Rp 150.000.000	APBD		500 Orang	Rp 185.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakiaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	60 Orang	Rp 80.000.000	APBD		70 Orang	Rp 90.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkulu	130 Orang	Rp 285.000.000	APBD		120 Orang	Rp 300.000.000	Dinas Sosial

1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	300 Orang	Rp 350.000.000	APBD		50 Orang	Rp 95.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	30 Orang	Rp 50.000.000	APBD		35 Orang	Rp 65.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	50 Orang	Rp 15.000.000	APBD		80 Orang	Rp 28.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	50 Orang	Rp 50.000.000	APBD		50 Orang	Rp 50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	35 Orang	Rp 55.000.000	APBD		35 Orang	Rp 45.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	50 Orang	Rp 350.000.000	APBD		50 Orang	Rp 350.000.000	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial		95%	Rp 32.733.800.000			95%	Rp 37.220.000.000	
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang diberikan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar		220 Anak	Rp 580.000.000			250 Anak	Rp 650.000.000	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	220 Anak	Rp 580.000.000	APBD	OK	250 Anak	Rp 650.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	Rp 32.153.800.000			100%	Rp 36.570.000.000	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kab. Bengkalis	66.500 Orang	Rp 375.000.000	APBD		50.000 Orang	Rp 350.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	56.197 Keluarga	Rp 190.000.000	APBD		56.197 Keluarga	Rp 220.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	15.633 Keluarga	Rp 30.120.000.000	APBD		16.500 Keluarga	Rp 35.000.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	100 Orang	Rp 1.468.800.000	APBD		60 Orang	Rp 1.000.000.000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial		100%	Rp 1.445.000.000			100%	Rp 1.625.000.000	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	Rp 1.295.000.000			100%	Rp 1.425.000.000	

1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	2.000 Orang	Rp 950.000.000	APBD		2.200 Orang	900.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	300 Orang	Rp 250.000.000	APBD		600 Orang	Rp 400.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	15 Orang	Rp 25.000.000	APBD		50 Orang	Rp 50.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	35 Orang	Rp 70.000.000	APBD		50 Orang	Rp 75.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100%	Rp 150.000.000			100%	Rp 200.000.000	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	29 Orang	Rp 150.000.000	APBD		27 Orang	Rp 200.000.000	Dinas Sosial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara dalam setahun		100%	Rp 456.000.000			100%	Rp 451.000.000	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara Kondisi dan Keadaannya		1 TMP	Rp 456.000.000			1 TMP	Rp 451.000.000	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	52 Makam	Rp 305.000.000	APBD		52 Makam	300.000.000	Dinas Sosial
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	12 Laporan	Rp 151.000.000	APBD		12 Laporan	151.000.000	Dinas Sosial
TOTAL JUMLAH BELANJA URUSAN									Rp 54.434.200.000				Rp 58.061.400.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2023. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sosial Kabupaten Bengkalis 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis, APBD Propinsi Riau, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan bidang Sosial
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan bidang Sosial yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial

4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyesuaian penyelesaian permasalahan Sosial dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Bengkalis, Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



Dra. Hj. MARTINI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630306 199403 2 002